

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
DENGAN MODEL CIPP (*CONTEX, INPUT, PROCESS, PRODUCT*)
DI KOTA BITUNG**

**Silke Pantouw
Charles R. Ngangi
Tommy F. Lolowang**

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Implementation of Minapolitan Area Development Program with CIPP Model (Context, Input, Process, Product in Bitung City) This research was conducted from May until July 2016 in Bitung City The data collection method used is primary and secondary data. The analytical method used in this research is descriptive qualitative analysis which is used to clearly describe the condition of development of Minapolitan area in Bitung City Evaluation model used is CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, Product, Result) The result of the research is Context Evaluation (1) Based on the evaluation of the implementation context of the development program of Minapolitan area in Bitung City is very suitable if the City of Bitung stipulated by the decree of the minister of marine and fishery Number KEP.32 / MEN / 2010 because Bitung City meets the requirements of a region determined as gai area minapolitan one of which is a strategic location and natural resources available. (2) Based on input evaluais seen from several aspects, among others: (a) infrastructure aspect, (b) institutional aspect and regulation, (c) funding aspect, (3) Based on process evaluation, where the blue ocean port becomes the motto of the mover and the harbor continues to be developed to match the fishing port in the Philippines. (4) Based on product evaluation, the implementation of minapolitan program in Bitung City increases the volume and value of capture fisheries production in Bitung City.

Keywords: evaluation, implementation, development program Minapolitan area, Bitung City

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di Kota Bitung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2016 di Kota Bitung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan/mengevaluasi secara jelas mengenai kondisi pengembangan kawasan minapolitan di Kota Bitung. Model Evaluasi yang digunakan adalah Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Hasil penelitian diperoleh Evaluasi Kontex (*Context Evaluation*) yaitu (1) Berdasarkan evaluasi konteks pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan di Kota Bitung sudah sangat sesuai jika Kota Bitung ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 karena Kota Bitung memenuhi syarat-syarat sebuah kawasan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan yang salah satunya adalah letak yang strategis dan sumber daya alam yan tersedia. (2) Berdasarkan evaluasi input dilihat dari beberapa aspek antara lain : (a) Aspek infrastruktur, (b) Aspek kelembagaan dan regulasi, (c) Aspek pendanaan, (3) Berdasarkan evaluasi proses, sudah sesuai dengan rencana awal dimana pelabuhan Samudera biru menjadi motto penggerak dan pelabuhan tersebut terus dikembangkan untuk menyamai pelabuhan perikanan di Filipina. (4) Berdasarkan evaluasi produk, pelaksanaan program minapolitan di Kota Bitung meningkatkan volume dan nilai produksi perikanan tangkap di Kota Bitung.

Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, program pengembangan kawasan Minapolitan, Kota Bitung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah untuk dimanfaatkan secara tepat dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi sumber daya alam tersebut adalah berbagai jenis sumber daya kelautan dan perikanan. dengan potensi yang sedemikian besar, dirasakan masih kurangnya pemamfaatan terhadap kekayaan kelautan tersebut. Sehingga untuk mengeksploitasi sumber daya tersebut secara optimal dan tentunya tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan disekitarnya diperlukan sebuah perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan konsep yang berpihak pada stakeholder dan dijalankan secara berkelanjutan. Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan dan pengembangan kelautan dan perikanan belum optimal dan berkesinambungan, salah satunya adalah masih kurangnya perencanaan pengembangan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan, Perencanaan Pembangunan yang berbobot sangat penting untuk menambahkan elemen yang berwawasan lingkungan demi kelangsungan hidup keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi ini, melalui pengembangan kawasan yang merupakan suatu usaha untuk membangun dan meningkatkan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi, manusia atau masyarakat dan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya dalam satu ekosistem. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain dengan ditetapkannya Konsepsi Minapolitan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, yaitu sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Konsep ini akan berjalan dengan baik jika seluruh aspek penggerak siklus aquabisnis mampu dibangun secara efektif. Pencapaian produksi dan kapasitas usaha akan mampu dicapai jika para pelaku utama maupun pelaku usaha secara ekonomi mampu mencapai titik optimal dari kelayakan usaha. Sedangkan kelayakan usaha tentunya sangat bergantung pada jalannya subsistem-subsistem yang saling berinteraksi mulai dari kegiatan di hulu (*on farm*)

sampai kegiatan di hilir (*off farm*), hal ini karena keberadaan subsistem dalam siklus yang berjalan secara efektif akan mampu meningkatkan efisiensi produksi. Bitung memiliki sumberdaya laut dan perikanan yang sangat potensial mencapai 587 ribu ton, sementara yang dimanfaatkan baru 147 ribu ton atau sekitar 25,04%. Potensi ikan ini tersebar di TelukTomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Sulawesi, dan utara Pulau Halmahera. Sumberdaya laut yang terkandung di perairan tersebut antara lain ikan tuna, cakalang, tongkol, paruh panjang, ikan tenggiri, cumi-cumi, ikan karang, dan lain-lain. Bitung memiliki letak strategis karena berada di Selat Lembeh yang berhadapan dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sehingga berperan sebagai pelabuhan perikanan lingkaran luar Indonesia. Keberadaannya di bibir Asia dan Pasifik memungkinkan pengembangan Bitung menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bitung yang merupakan salah satu kawasan minapolitan di wilayah Indonesia yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 dan Nomor. 39/Men/2011 dan Pemerintah Kota Bitung menetapkan Kawasan Minapolitan Perikanan di Kota Bitung dengan Surat Keputusan Walikota Bitung No.130 Tahun 2010. Penetapan sebagai kawasan minapolitan ini menuntut komitmen kota Bitung dalam pelaksanaan konsep ini dengan memenuhi syarat kesiapan yang mengacu pada indicator pilar pembangunan Minapolitan.

Program pengembangan minapolitan ini memerlukan suatu evaluasi terhadap tujuan awal dicanangkannya program ini. Evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap apa yang telah dilaksanakan sehingga bisa menjadi koreksi bagi program pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Bitung secara keseluruhan untuk menjuang kemajuan kawasan tersebut, Evaluasi diperlukan untuk mengetahui kesesuaian efektifitas dan efisiensi kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan serta keberhasilan kegiatan. Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka akan diteliti hal-hal tentang "Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di Kota Bitung".

Rumusan Masalah

Mengacu dari berbagai hal yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan kawasan Minapolitan di kota Bitung?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: Mengevaluasi Pelaksanaan Program pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Bitung dan Kementrian Kelautan dan perikanan dalam menyusun kebijakan khususnya kebijakan yang berhubungan dengan Minapolitan di Kota Bitung.
2. Memberikan kontribusi bahan referensi dan sumber informasi oleh pihak lain yang memerlukan penelitian yang lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung.
3. Memberikan informasi serta menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca tentang Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bitung, berlangsung 3 bulan yaitu dari dari bulan Mei sampai dengan Juli 2016.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dengan observasi melalui peninjauan langsung ke lapangan dan wawancara serta pengambilan data di lokasi penelitian, Data Sekunder berupa data yang sudah dipublikasikan oleh berbagai instansi

pemerintah, antara lain peta, buku pedoman, laporan instansi, buku statistik dan tulisan ilmiah.

Definisi Operasional

Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) di Kota Bitung dengan melihat capaian indikator keberhasilannya yaitu capaian dari indikator utamanya berupa peningkatan produksi dan produktivitas nelayan.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini didahului dengan mengumpulkan data dari instansi terkait kemudian diolah untuk menjawab selanjutnya dilakukan evaluasi dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan/mengevaluasi secara jelas mengenai kondisi pengembangan kawasan minapolitan di Kota Bitung. Model Evaluasi yang digunakan adalah Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*):

1. Evaluasi Konteks, aspek yang dievaluasi adalah latar belakang Kota Bitung sebagai kota minapolitan dengan melihat syarat sebuah kota atau daerah ditetapkan sebagai kota minapolitan.
2. Evaluasi Input, aspek yang dievaluasi adalah;
 - a. Aspek Infrastruktur, kelengkapan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan.
 - b. Aspek Kelembagaan dan Regulasi, Komitmen daerah dan pusat dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan.
 - c. Aspek Pendanaan, ada tidaknya dana yang tersedia dalam nedukung pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan.

3. Evaluasi Proses merupakan pelaksanaan program pengembangan minapolitan. Yang akan dievaluasi adalah program-program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan.
4. Evaluasi Produk adalah hasil proses kegiatan program pengembangan kawasan minapolitan dan yang akan dievaluasi adalah apakah dengan pelaksanaan minapolitan meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah Kota Bitung

Munculnya Bitung ke medan sejarah tidak terlepas dari perjuangan seorang yang bernama Simon Tudus sebagai Tunduang Wanua Bitung. Berawal dari satu tekad untuk membuka sebuah huma di kawasan yang terletak di tepian pantai. Simon mendirikan sebuah gubuk di bawah pohon besar di antara sekian banyak pohon bitung yang tumbuh subur di daerah rawa. Pohon itu tumbuh di rentang pagar Pos I Pelabuhan Bitung sekarang dan kurang lebih 30 meter dari tepian pantai saat air pasang naik. Keberadaan gubuk di huma tentunya menjadi tempat berteduh khususnya ketika laut kurang bersahabat. Setiap orang yang mencari tempat berteduh, Simon Tundus akan menjawab di gubuk bawah pohon bitung. Suatu ketika Simon Tudus sedang berteduh setelah menyaksikan banyaknya nelayan berdatangan secara bergantian, tidak saja dari sekitar Tonsea, Sangihe Talaud dan Maluku, Habibu dan Papagami yang beragama Islam, ia melihat suatu hal yang mengagumkan yakni bermacam-macam burung silih berganti hinggap di pohon bitung. Atas peristiwa ini ia berfirasat bahwa suatu waktu tempat ini akan didiami oleh banyak suku bangsa.

Dalam Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek yang diedit oleh Mr. K.G.F. Stellen dan Drs. W.Aerbersold dari penulis N. Adrian, 1893, cetakan terakhir tahun 1959, kata Bitung adalah nama sebuah pohon, *Stevige Koroestige Boom*. Dalam bahasa botani disebut *Hivia Hospital*. Dari sekian banyak pertemuan para nelayan maka kata bitung (*Witung*) sudah beralih makna dari nama pohon ke penunjukan tempat. Akhirnya makna ini berkembang sampai sekarang. Para pemukim beragama Kristen terdiri

dari Elias Lontoh Sompotan, Daniel Mais Pongoh, Hendrikus Langie Langelo, Martinus Langelo, Andries Rompis, Mais Pantow, Benyamin Wangi, Andries Hendrik Dulang Kansil dan Yesaya Malalutan. Mereka inilah antara lain penduduk Bitung pertama setelah Simon Tudus yang merupakan perintis terbentuknya Desa Bitung (Negeri Bitung).

Pada tanggal 1 Januari 1918 Bitung diakui oleh Pemerintah Belanda sebagai suatu negeri, walaupun pengesahannya baru pada tanggal 1 Januari 1928 setelah dikeluarkan beslit oleh pemerintah. Tahun 1926 Theopilus Bawotong, Frederik Tidatu dan Hendrik Dulok Kansil mewakili penghuni Desa Bitung menghadap Hukum Besar Tonsea di Airmadidi. Tahun 1927 Bitung menjadi desa di bawah Kehukumtuaan Madidir dengan Elias Lontoh Sompotan, cucu mantu Simon Tudus diangkat menjadi kepala jaga tuduan. Tahun 1927 Elias Lontoh Sompotan diangkat menjadi Hukum Tua sampai tahun 1928, dan diganti oleh H.L.Langelo. Pada 1 Juli 1947 Bitung menjadi distrik bawahan yang berdiri sendiri terpisah dari distrik bawahan dengan luas wilayah 19.870 Ha, terdiri dari 13.428 jiwa tersebar pada 11 desa. Tahun 1964 dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 244 Tahun 1964, Bitung ditetapkan menjadi satu Kecamatan dengan jumlah penduduk 32.000 jiwa tersebar pada 28 desa dengan luas wilayah 29,79 km². Tahun 1967 dibentuklah Kantor Penghubung atau Wakil Bupati Minahasa di Bitung, sebagai koordinator seluruh Pemerintahan dan Pembangunan. Tahun 1968 Gubernur Propinsi Sulawesi Utara membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bitung. Awal April 1971 Bupati Minahasa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Penghubung Bupati Minahasa di Bitung. Pada tanggal 2 Juli 1974, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengangkat W. A. Worang sebagai kepala atas 3 lembaga yakni penghubung, bupati, dan kepala dinas pembangunan Bitung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, maka pada tanggal 10 April 1975 Kecamatan Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif yang pertama di Indonesia, dengan luas wilayah 304 km² terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa. Dengan semakin berkembangnya Bitung yang kemudian dijuluki Kota Serba Dimensi yaitu Kota Pelabuhan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota Pemerintahan, pada tanggal 10 Oktober 1990 Kota Administratif

Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, dengan luas wilayah 304 km², 3 kecamatan dan 44 kelurahan. Drs. S.H. Sarundayang merupakan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bitung yang pertama. Pada tahun 1995, sesuai dengan dengan PP Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 terbentuklah Kecamatan Bitung Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Bitung Tengah. Dengan demikian Kota Madya Bitung menjadi 4 wilayah kecamatan. Memasuki era otonomi daerah, penyebutan kotamadya dirubah menjadi “kota” sehingga menjadi “Kota Bitung”. Pada tanggal 14 Desember 2001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 100 Tahun 2001 Kecamatan Bitung Tengah mekar menjadi dua kecamatan bertambah Kecamatan Bitung Barat sehingga sejak saat itu jumlah kecamatan di Kota Bitung menjadi 5 kecamatan. Jumlah kelurahan juga mekar menjadi 60 dari sebelumnya yang 44 kelurahan. Dan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 kembali Kota Bitung mengalami pemekaran sehingga menjadi 8 kecamatan dan 69 kelurahan Kota Bitung dipimpin oleh seorang Walikota yang memiliki masa jabatan 5 tahun.

Geografi

Kota Bitung terletak pada posisi geografis 1°23'23" - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT. Luas Wilayah Lautan 439,8 Km² dan Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 31.350,35 Ha terbagi dalam delapan wilayah kecamatan serta 69 kelurahan. Berikut adalah nama kecamatan yang terdapat di Kota Bitung, dengan jumlah kelurahan.

- 1) Kecamatan Ranowulu yang memiliki 11 Kelurahan.
- 2) Kecamatan Matuari yang memiliki 8 Kelurahan.
- 3) Kecamatan Girian yang memiliki 7 Kelurahan.
- 4) Kecamatan Madidir yang memiliki 8 Kelurahan.
- 5) Kecamatan Maesa yang memiliki 8 Kelurahan.
- 6) Kecamatan Aeertembaga yang memiliki 10 Kelurahan.
- 7) Kecamatan Lembeh Utara yang memiliki 10 Kelurahan.
- 8) Kecamatan Lembeh Selatan yang memiliki 7 Kelurahan.

Dilihat dari aspek topografis, keadaan tanah sebagian besar daratan Bitung atau 45,06 persen berbukit dan 32,73 persen bergunung. Hanya 4,18 persen merupakan dataran landau serta sisanya 18,03 persen berombak. Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aeertembaga, sampai dengan Tanjung Merah di bagian Barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman.

Kota Bitung berbatasan dengan :

- 1) Sebelah utara dengan : Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku);
- 2) Sebelah Timur dengan : Laut Maluku;
- 3) Sebelah Selatan dengan : Laut Maluku
- 4) Sebelah Barat dengan : Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara).



Gambar 1. Peta Kota Bitung

Visi Kota Bitung

Arah kebijakan pembangunan Kota Bitung adalah menjadikan kota bitung menjadi kota berkelanjutan (*sustainable city*). Dengan kualitas air dan kualitas udara yang terjaga baik, lingkungan hidup dan ekosistem alam yang lestari serta kehidupan masyarakat kota dengan ikatan sosial dari semua elemen lapisan masyarakat terjalin dengan baik disertai dengan ketersediaan layanan publik yang memadai sehingga keamanan dan kenyamanan penduduk terjamin dan kota bitung menjadi kota yang produktif serta memiliki daya saing yang tinggi. Berdasarkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung 2011 – 2016 adalah Bitung Kota Bahari yang sejahtera, demokratis dan damai Visi Pembangunan Kota Bitung ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Bitung sebagai Kota Bahari karena aktivitas perekonomian warga kota Bitung banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan

- pesisir pantainya, serta adanya pelabuhan Internasional Bitung sangat berpeluang menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kawasan Asia Pasifik, inilah potensi kota Bitung yang harus dioptimalkan disamping potensi hutan cagar alam dan pertanian serta perkebunan, demi untuk mencapai masyarakat kota yang sejahtera.
2. Terwujudnya Kota Bitung yang Sejahtera mengandung pengertian sejahtera yang terukur dan nyata, Sejahtera yang nyata adalah, terpenuhinya semua kebutuhan seperti kebutuhan Pangan, Kebutuhan Sandang, dan kebutuhan hubungan suami dan istri serta keluarga ini hal mendasar yang harus terjamin pemenuhannya. Sejahtera yang akan diwujudkan juga termasuk rasa aman, bebas dari segala ancaman, kejahatan dan konflik, serta bebas memeluk agama serta menjalankan ibadah secara damai.
 3. Terwujudnya Kota Bitung yang Demokratis mengandung pengertian bahwa semua penduduk warga kota Bitung akan diperlakukan sama dihadapan hukum, warga kota berhak mendapatkan keadilan dan tidak ada diskriminasi, Semua warga kota boleh menyampaikan pendapatnya, dan ikut berorganisasi (yang tidak terlarang). Pendapat Masyarakat akan diperhatikan dan sangat dihargai.
 4. Terwujudnya Kota Bitung yang Damai mengandung pengertian bahwa kehidupan masyarakat kota Bitung senantiasa diwarnai nilai-nilai religius dan budi pekerti yang luhur. Kehidupan damai juga berarti bahwa upaya penyelesaian konflik tidak selalu harus memutuskan siapa yang benar atau siapa yang salah, upaya damai adalah hakekatnya musyawarah untuk mufakat, tanpa mengesampingkan rasa keadilan. Masyarakat kota Bitung adalah masyarakat yang Hidup Damai dalam keadilan. Inilah yang akan mewarnai kehidupan masyarakat kota Bitung. Sesuai dengan harapan terwujudnya Visi Pembangunan Kota Bitung maka ditetapkan Misi Pembangunan kota Bitung 2011-2016 sebagai upaya untuk mewujudkan Visi

Pembangunan tersebut. Misi Pembangunan Kota Bitung dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjadikan Bitung sebagai Pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik dengan Kota yang bercirikan kota Bahari.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kota
3. Menciptakan kondisi masyarakat kota yang Demokratis
4. Menjaga kerukunan dan kedamaian.

Sebuah kesimpulan dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Bitung menyangkut pengembangan Kawasan Minapolitan adalah, Visi dan Misi Pembangunan Kota Bitung adalah sangat mendukung keberadaan dan pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung. Melalui Visi dan Misi ini Kota Bitung tentunya memiliki komitmen dalam mewujudkan Kawasan Minapolitan.

Hasil Penelitian

Konsep Minapolitan di Indonesia

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dimana $\pm 2/3$ dari seluruh wilayah Indonesia merupakan laut. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP. 18/MEN/2011, luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta km², dengan panjang pantai 95.181 km. Dengan luas wilayah laut Indonesia tersebut, maka Indonesia dikaruniai dengan keanekaragaman kehidupan hayati (seperti ikan dan terumbu karang) dan nonhayati. Karena itu, perikanan laut (meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya) merupakan sumber daya alam yang sangat potensial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Secara nasional, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun. Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 juta ton per tahun, dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan Kementerian Kelautan dan Perikanan maksimum 5,2 juta ton per tahun, berarti hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun. Akan tetapi sumbangan dari sektor perikanan untuk seluruh Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2011 baru sekitar 3,1% atau sebesar Rp227.761 miliar. Jumlah produksi perikanan Indonesia sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain dengan panjang

pantai yang lebih pendek. Negara India yang dengan panjang pantai 8.041 km dapat menghasilkan 2,95 juta ton pada tahun 1998, kemudian negara Cina dengan panjang pantai hanya 14.500 km menjadi penghasil ikan terbesar pada tahun 1999 sebesar 30 juta ton . Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokmin Dahuri juga mengatakan, potensi perikanan Indonesia pada tahun 2011 sekitar 65 juta ton per tahun, dan baru dimanfaatkan 13,4 juta ton atau 20,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya alam dari sektor perikanan di Indonesia masih sangat berpotensi untuk digali. Untuk itulah digalakan revolusi biru dan pengembangan kawasan Minapolitan di daerah-daerah Indonesia yang potensial.

Pada tingkat implementasi, Revolusi Biru akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah menggunakan konsep Minapolitan. Minapolitan sendiri berasal dari kata mina berarti ikan dan politan berarti polis atau kota, sehingga secara bebas dapat diartikan sebagai kota perikanan. Pengembangan konsep dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan cepat tumbuh layaknya sebuah kota (Sunoto, 2010) Konsep Minapolitan di Indonesia, merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan kawasan Minapolitan di Indonesia merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Konsep Minapolitan didasarkan pada potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar dan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya. Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik secara internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk memenuhi harapan tersebut, diperlukan kebijakan strategis yang didasarkan pada realitas beserta permasalahannya dan kondisi masa depan yang diharapkan. Realitas dan permasalahan,

sekaligus tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan kebijakan strategis ke depan adalah sebagai berikut:

1. Luas laut Indonesia 5,8 juta km² atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, akan tetapi PDB perikanan baru sekitar 3,2%.
2. Potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, akan tetapi nelayan masih miskin.
3. Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, sehingga hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun.
4. Produksi Tuna naik 20,17% pada tahun 2007, akan tetapi produksi Tuna hanya 4,04% dari seluruh produksi perikanan tangkap.
5. Jumlah nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan.
6. Jumlah nelayan naik terus, yaitu 2,06% pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka.
7. Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%, akan tetapi sebanyak 811.453 RTP atau 85% RTP berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan motor tempel.
8. Armada perikanan tangkap di laut sebanyak 590.314 kapal, akan tetapi 94% berukuran kurang dari 5 GT dengan SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah.
9. Potensi tambak seluas 1.224.076 ha, akan tetapi realisasi baru seluas 612.530 ha.
10. Potensi budidaya laut seluas 8.363.501 ha, akan tetapi realisasi hanya seluas 74.543 ha.
11. Tenaga kerja budidaya ikan sebanyak 2.916.000 orang, akan tetapi kepemilikan lahan perkapita rendah dan hidupnya memprihatinkan.
12. Jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, akan tetapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil.
13. Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan, akan tetapi yang memproduksi kurang dari 50% dengan kapasitas produksi maksimum sekitar 60%.

14. Ekspor produk perikanan 857.783 ton dengan nilai US\$ 2.300.000, akan tetapi produksi turun 7.41% pada tahun 2006-2007, bahkan volume ekspor udang turun 5.04% dan nilainya pun turun 6.06%.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan tersebut diperlukan kebijakan strategis yang inovatif dan langkah-langkah terobosan yang efektif. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim dengan gerakan yang mendasar dan cepat, yaitu Revolusi Biru. Pada tataran implementasi diperlukan sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Konsep pembangunan tersebut sejalan dengan arah umum pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan pengembangan kawasan. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif dengan konsep Minapolitan. Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai langkah strategis perwujudan Revolusi Biru.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di perkotaan. Dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan kemudahan atau peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu

1. Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan
2. Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu

1. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat,
2. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan
3. Penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat.

Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan. Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan atau pemasaran

1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem

produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti mempendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.

3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
 - d. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan

e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.

3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
 - a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

Pengembangan kawasan minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu. Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan melalui:

- a. kampanye Nasional;
- b. menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil;
- c. mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan;
- d. pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis; dan
- e. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Selanjutnya, konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar, baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja

yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan pendekatan sentra produksi, sumberdaya pembangunan, baik sarana produksi, anggaran, permodalan, maupun prasarana dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat.



Gambar 2. Peta Penetapan Kawasan Minapolitan di Indonesia

Kawasan Minapolitan di Kota Bitung

Kota Bitung sangat baik dilakukan usaha untuk pengembangan perikanan tangkap karena potensi sumberdaya hayati perikanan ditemukan hampir sepanjang pantai dan menyebar diseluruh perairannya, terutama di kawasan perairan pertemuan antara laut Sulawesi dan Laut Maluku. Kawasan ini kaya akan jenis ikan, baik ikan pelagis maupun ikan demersal. Sumberdaya manusia pada bidang perikanan dan kelautan tidak hanya pembudidayaan ikan/nelayan atau masyarakat nelayan pada umumnya, tetapi juga termasuk aparat pembina perikanan itu sendiri. Sedangkan untuk konsumsi ikan perkapita penduduk Kota Bitung pada tahun 2009 telah melampaui ketentuan Widya Karya Gizi Nasional 1993 (26,55 Kg/Kapita/Tahun) yaitu sebesar 35 Kg/Kapita/Tahun. Kawasan Minapolitan Kota Bitung adalah salah satu kawasan pengembangan Minapolitan berbasis perikanan tangkap dari beberapa kawasan minapolitan di Indonesia yang ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.32/MEN/2010 dan ditindak lanjuti oleh Walikota Bitung dengan menetapkan Kawasan Minapolitan Kota Bitung meliputi Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Selatan dan Kecamatan Lembeh Utara dengan basis area Pelabuhan Perikanan Samudra Bitung, melalui Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor :130 Tahun 2010 Kota Minapolitan Bitung atau kota perikanan di Bitung merupakan peluang bagi Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, serta Indonesia untuk membangkitkan ekonomi negara

melalui pengembangan wilayah pesisir. Tak hanya perikanan saja, Minapolitan juga mencakup pengembangan di bidang industri pengolahan produk laut, pariwisata kelautan, pendidikan serta pelayanan jasa, dll. Jika efisiensi serta akselerasi diharapkan dalam pelaksanaan konsep Kota Minapolitan Bitung, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penangkapan ikan melalui pengembangan teknologi juga pemanfaatan potensi alam melalui *Local Economic Development (LED)*. Namun dari segi perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pengembangan Minapolitan Kota Bitung dapat menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki citra pedesaan daerah laut/pesisir. Banyak kawasan pesisir yang mengalami pembangunan namun gagal dalam proses pengembangannya. Konsep Kota Minapolitan memang dirasa cukup ideal untuk mengangkat kawasan pesisir Bitung baik dari segi ekonomi lokal maupun kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi jika dalam pelaksanaannya terjadi ketidakseimbangan dalam kinerja tiap-tiap *stakeholder*, maka konsep Minapolitan tersebut bisa jadi hanya berjalan sendiri, tanpa beriringan dengan kebutuhan dasar masyarakat yang berada di dalamnya. Pusat pengembangan Kawasan Minapolitan kota Bitung dimana sentra pengembangannya yang ditetapkan di Kecamatan Aertembaga dan Lembeh Selatan serta Lembeh Utara, karena dengan pertimbangan dimana kecamatan ini memiliki sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini antara lain dengan adanya fasilitas atau infrastruktur seperti adanya pelabuhan perikanan, unit pengolahan ikan dan kemudahan aksesibilitas karena lokasinya terletak di pusat kota, Hal ini terkait juga dengan visi kota Bitung sebagai Kota Bahari, maka menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan termasuk aktivitas bagi para nelayan untuk menjaga dan melindungi setiap kegiatan yang berhubungan dengan wilayah laut dan pesisir pantai. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan tata ruang kawasan pesisir Kota Bitung yang akan dikembangkan sebagai kawasan Minapolitan Berbasis perikanan tangkap:

1. Faktor ekologis yang dapat diidentifikasi melalui eksisting fisik, kondisi eksisting struktur tata ruang dan lingkungan juga ekosistem pesisir. Mengingat bahwa konsep Minapolitan ini haruslah berorientasi pada lingkungan juga agar pengembangan Minapolitan yang ada terarah tepat sasaran.

2. Faktor kondisi sosial, dimana segala komposisi demografi penduduk, adat-budaya, proses sosial (kerjasama/konflik) hingga peran lembaga masyarakat/pemerintah, perlu diidentifikasi apakah menimbulkan suatu potensi ataupun masalah. Identifikasi keadaan sosial ini perlu diprioritaskan agar mampu mengetahui kebutuhan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Seringkali aspek sosial ini sangat sensitif dalam metode pendekatan pengembangannya. Terutama yang berkaitan dengan adat-budaya. Karena begitu beragamnya kultur yang ada di Kota Bitung ini, diharapkan peran lembaga pemerintahan di wilayah Kota Bitung bisa lebih berperan aktif dalam memahami karakter sosial masyarakat setempat. Tiap-tiap Bappeda sebaiknya konsisten dalam pengkoordinasian, pemanfaatan ruang antar sektor. Sementara itu perlu dibentuk dinas teknis yang khusus bertanggung jawab terhadap pengaturan teknis sektor tersebut.
3. Faktor terakhir adalah pertimbangan dari faktor ekonomi. Perlu dilakukan identifikasi pada proses koleksi-distribusi dalam kegiatan ekonomi lokal/regional sumber daya pesisirnya. Selain itu domain serta persebaran kegiatan ekonomi di kawasan Bitung yang ingin dikembangkan dengan konsep Minapolitan perlu ditelusuri.

Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Minapolitan di Bitung Menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product Evaluation*)

Pada dasarnya, definisi dari suatu evaluasi berbeda-beda sesuai dengan pendapat dari masing-masing pakar evaluasi. Definisi tersebut berkembang sesuai dengan pakar yang mengemukakannya. Evaluasi merupakan suatu istilah baru dalam kajian keilmuan yang telah berkembang menjadi disiplin ilmu sendiri. Ilmu kajian tentang evaluasi ini juga telah banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam memberikan informasi data, khususnya mengenai pelaksanaan suatu program tertentu yang akhirnya mampu memberikan rekomendasi dan digunakan oleh pelaksana program tersebut yang dijadikan suatu keputusan. Dalam proses pengimplementasian suatu program, tentu mempunyai perbedaan dalam evaluasi. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan maksud dan tujuan dari suatu program. Misalkan saja,

evaluasi dalam proses pembelajaran dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana hasil belajar telah tercapai dengan optimal sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran itu sendiri. Sedangkan pada evaluasi pada kinerja pegawai dilakukan dengan tujuan untuk melihat kualitas, loyalitas, atau motivasi dari kerja pegawai, sehingga dapat menghasilkan hasil produksi. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, muncul beberapa teknik evaluasi dalam pengimplementasian suatu program. Salah satu teknik dalam evaluasi ialah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Evaluasi pelaksanaan kawasan Minapolitan di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode analisis deskriptif CIPP (*Context, Input, Process and Product Evaluation*) atau EKMPP (Evaluasi Konteks, Masukan, Proses, dan Produk). Dengan melihat Indikator Kinerja Utama Minapolitan Perikanan Tangkap yaitu :

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Nelayan
2. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
3. Peningkatan *Multiplier Effect*
4. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pelabuhan perikanan.
5. Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Sebagai Sentra Usaha

Context Evaluation

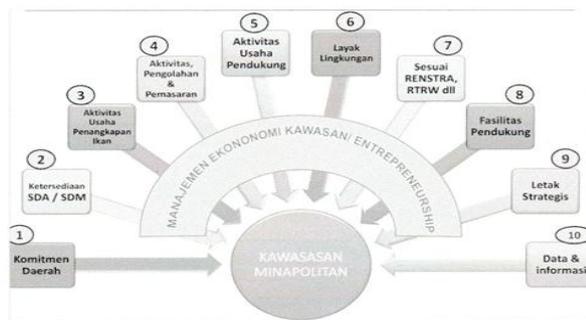
Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi objektif yang akan dilaksanakan. Evaluasi konteks ini menjawab pertanyaan: “Apa yang harus dilakukan?” khususnya apa yang harus dilakukan dalam rangka menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Kota Bitung serta mengacu pada Indikator Kinerja Utama Minapolitan Perikanan Tangkap. Evaluasi Pelaksanaan Program pengembangan minapolitan di Kota Bitung dilihat dari aspek konteks meliputi :

Latar Belakang Bitung sebagai kawasan Minapolitan

Persyaratan sebuah kawasan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen daerah
2. Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia
3. Adanya aktivitas usaha penangkapan ikan
4. Adanya aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil-hasil laut dan perikanan

5. Adanya aktivitas usaha pendukung terkait dengan aktivitas utama tadi
6. Lingkungan yang layak
7. Sesuai dengan Renstra, RTRW, dan lain-lain dari perencanaan awal kota Bitung
8. Adanya fasilitas pendukung untuk menunjang kawasan Minapolitan
9. Memiliki letak strategis
10. Memiliki data dan informasi yang terkait dan relevan tentang penciptaan



Gambar 3. Syarat Kawasan Minapolitan

Dari persyaratan diatas dapat dilihat Kota Bitung memiliki komoditas unggulan, Bitung merupakan salah satu kota penghasil ikan terbesar di Indonesia. Bitung memiliki letak strategis karena berada di Selat Lembeh yang berhadapan dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sehingga berperan sebagai pelabuhan perikanan lingkaran luar Indonesia. Keberadaannya di bibir Asia dan Pasifik memungkinkan pengembangan Bitung menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia. Dengan potensi besar ini, maka di Bitung seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dari sektor kelautan. Namun, pengembangan sektor kelautan ini masih belum menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari para pemegang kebijakan. Akibatnya, potensi kelautan belum diolah secara maksimal sehingga sektor kelautan belum mampu meningkatkan perekonomian secara signifikan. Menjadi potensi dan produksi perikanan laut di Kota Bitung maka, pengembangan industri perikananannya lebih tepat diarahkan pada industri pengolahan perikanan laut, khususnya untuk peningkatan nilai tambah potensi beberapa jenis ikan ekonomis tinggi seperti cakalang, tuna, dan layang. Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dimana daerah ini memiliki spesies endemik langka,

kawasan pemijahan ikan paus, daerah migrasi ikan pelagis (tuna, cakalang, serta tongkol), potensi ini menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan 60% dari 2.000 jenis ikan yang ada di perairan Indonesia berada di perairan kawasan Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan volume dan nilai ekspor perikanan di Kota Bitung. Hal ini berarti bahwa kota Bitung layak untuk dijadikan sebagai Kota Minapolitan yang memfokuskan perekonomian pada potensi kelautan khususnya pada perikanan tangkap, serta pengolahan produk-produk hasil perikanan. Pada Tabel 1 berikut merupakan Tabel permintaan ekspor ikan di Kota Bitung untuk negara tujuan dari tahun 2006-2015.

Tabel 1. Permintaan Ekspor Ikan Kota Bitung untuk Negara Tujuan 2006-2015

No.	Negara-Negara Pengimpor	Total Permintaan Ekspor Ikan Rata-Rata/Tahun (Ribuan ton)	Total Perkembangan GDP Negara Pengimpor (Juta US\$)
1.	Jepang	723.234	311,318
2.	Amerika Serikat	435.600	628,696
3.	Singapura	335.679	120,779
4.	Korea Selatan	319.110	240,557
5.	Kanada	234.889	219,887
6.	Australia	325.560	201,445
7.	Tiongkok	113.563	100,366
8.	Italia	120.300	199,887

Sumber : Word Bank (IBRD, Annual Report Look (2015)

Tabel 1 ini menjelaskan dimana total permintaan dan total GDP dari Negara pengimpor ikan di Kota Bitung. Pada tabel tersebut nampak total permintaan ikan oleh Negara pengimpor ikan dengan total perkembangan GDP Negara pengimpor iakan dari tahun 2006-2015. Negara pengimpor ikan di Bitung terdapat delapan Negara yaitu: Jepang, Amerika Serikat, Canada, Korea Selatan, Singapore, Autralia, China, Itali. Untuk Negara pengimpor ikan terbesar adalah : Jepang sebesar 723.234 ton dan total GDP US\$ 311,318 dan berikutnya adalah negara Amerika Serikat sebesar 435.600 ton dan total GDP sebear US\$ 628,696 . Sedangkan dilihat dari tabel diatas bahwa sebagian ada dikawasan Asia seperti: Singapore, China, Korea Selatan dan dibenua Eropah. GDP dari Negara pengimpor pada nyatanya sangat berpengaruh pada permintaan akan ekspor ikan di Bitung dan turut

pula berpengaruh pada pertumbuhan industri dalam jangka waktu tertentu. Dari Tabel 3 terlihat bahwa permintaan ekspor ikan dari Kota Bitung berasal dari negara-negara maju, negara-negara besar, serta negara-negara di Asia lainnya seperti dari Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Kanada, Australia, Tiongkok, dan Italia. Karena besarnya permintaan tersebut maka tujuan ekspor perikanan tersebut yang sangat besar membuat potensi pengembangan Kota Bitung sebagai kawasan Minapolitan sangat luas dan besar. Pada Tabel 2 merupakan data jumlah perahu/kapal ikan di Kota Bitung.

Tabel 2. Jumlah Perahu/Kapal Ikan di Kota Bitung Tahun 2011- 2015

Tahun	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor	Jumlah
2011	1.029	520	409	1.600
2012	700	510	776	1.986
2013	690	515	778	1.983
2014	588	1.150	983	2.721
2015	601	1.142	871	2.726

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka

Pada tahun 2011 ditinjau dari kategori kapal yang tersebar di Kota Bitung, jumlah perahu tanpa motor yang digunakan untuk menangkap ikan sebesar 40 persen. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah kapal motor kurang dari 5 GT sebesar 5 persen dari total jumlah kapal yang ada. Kapal motor dengan kategori 6-10 GT yang terdapat di Bitung sebanyak 10 persen. Pengurusan administrasi seperti surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan untuk kapal kurang dari 10 GT dilakukan di Kota Bitung. Kapal penangkap ikan dengan kategori 11-30 GT atau kapal yang memperoleh izin pada tingkat provinsi berjumlah sebanyak 9 persen dari total jumlah kapal yang terdapat di Kota Bitung. Kapal dengan kategori lebih dari 30 GT terdapat di Kota Bitung sebanyak 35 persen.

Seiring waktu usaha perikanan tangkap dengan kapal motor lebih mendominasi saat ini. Hal ini terjadi seiring peningkatan pendapatan para nelayan sekaligus pemilik usaha dari hasil penangkapan ikannya. Kapal motor memiliki kapasitas penangkapan ikan dalam jumlah yang besar dan anak buah kapal dengan jumlah lebih dari 5 orang. Hal ini tentunya membuat usaha perikanan tangkap membutuhkan modal yang

cukup besar agar bisa meningkatkan hasil produksinya sehingga pendapatannya juga ikut meningkat. Dari uraian persyaratan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung sudah sangat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung 2011– 2016 dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan perekonomian Kota Bitung. sedangkan sasaran pembangunannya adalah : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di Kawasan Minapolitan khususnya dan Kota Bitung umumnya. Dan Pengembangan Kawasan Minapolitan sudah sesuai dengan dokumen RTRW Kota Bitung 2010 – 2030 dimana Kawasan perikanan sebagai kawasan Minapolitan di Kota Bitung akan diarahkan ke Kecamatan Aertembaga (khususnya Kelurahan Kasawari dan Kelurahan Makawidey), Kecamatan Lembeh Utara, dan Kecamatan Lembeh Selatan. Penetapan kawasan Minapolitan ini didasarkan pada kriteria bahwa wilayah kawasan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan; dan wilayah kawasan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Saat ini kegiatan di kawasan perikanan Bitung meliputi kegiatan penangkapan, kegiatan budidaya perikanan darat, dan kegiatan industri pengolahan hasil. Secara umum rencana struktur ruang Kota Bitung sesuai dengan dokumen RTRW Kota Bitung 2010 – 2030 dapat dilihat dari peta berikut :



Gambar 4 .Peta RTRW Kota Bitung 2010 – 2030

Secara Geografis Bitung Pada kawasan Minapolitan Kota Bitung terdapat dua kawasan secara geografis terpisah yaitu kawasan yang berada pada Zona inti pengembangan terdapat di Kecamatan Aertembaga tepatnya pada

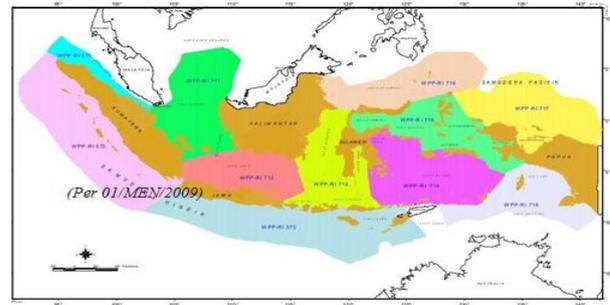
kedudukan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung dan Zona pengembangan dalam kawasan minapolitan Kota Bitung yang secara langsung mendukung kebutuhan terhadap zona inti. Zona pengembangan di dalam kawasan minapolitan Kota Bitung adalah kawasan Pulau Lembeh yaitu kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan, dan wilayah lain yang ada di Kecamatan Aertembaga di luar Zona inti.



Gambar 5. Peta Zona Inti Minapolitan

PPS Bitung berada pada 0 koordinat geografi 0 26`55` Lintang 0 Utara dan 125 12`20` Bujur Timur (berseberangan dengan Pulau Lembeh). Kondisi geografis tersebut menyebabkan lokasi pelabuhan menjadi terlindungi terhadap pengaruh ombak dan angin. Letak PPS Bitung, juga telah menjadikan posisi pelabuhan berhadapan langsung dengan daerah tangkapan (fishing ground) yang potensial di ZEEI Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan sekitarnya. PPS Bitung ditinjau berdasarkan aspek topografi, mempunyai karakteristik wilayah yang berbukit (45,06%), bergunung (32,73%), daratan landau (4,18%), dan berombak (18,03%). Lokasi PPS Bitung bagian timur dimulai dari pesisir pantai Aertembaga sampai dengan Tanjung Merah, sedangkan wilayah baratnya merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 150 (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2015).

Dilihat dari letak Geografis yang ada sangat tepat PPS Bitung sebagai Zona inti Pengembangan Kawasan Minapolitan karena PPS Bitung terletak di di bibir pasifik dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan potensi sumberdaya ikan yang relatif cukup besar berada pada WPP – RI 715, 716, dan WPP-RI 717.



Gambar 6. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Kawasan inti Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Samudra sudah sangat tepat salah satunya adalah lokasi tersebut didukung dengan 45 Unit Pengolahan Ikan, 5 (lima) galangan kapal, pelabuhan umum, pelabuhan peti kemas dan dekat dengan bandara internasional Sam Ratulangi.



Gambar 7. Peta Zona Pengembangan Minapolitan

Zona pengembangan dalam kawasan minapolitan Kota Bitung adalah kawasan yang secara langsung mendukung kebutuhan terhadap zona inti. Zona pengembangan di dalam kawasan minapolitan Kota Bitung adalah kawasan Pulau Lembeh yaitu kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan kemudian wilayah lain yang ada di Kecamatan Aertembaga di luar zona inti

Dilihat dari Aspek Geografis Kondisi pemanfaatan lahan saat ini di zona pengembangan untuk Kecamatan Aertembaga adalah berupa permukiman, jasa-perdagangan, industri (pengolahan ikan) dan pariwisata. Kegiatan permukiman yang berada di pesisir pantai terletak di bagian utara kawasan yaitu di Kelurahan Tandurusa, Kelurahan Makawidey dan Kelurahan Kaswari. Sedangkan pada kelurahan lainnya, kegiatan permukiman lebih menjauhi pesisir pantai dan kegiatan yang medominasi adalah kegiatan kepelabuhanan dan pariwisata. Kegiatan pariwisata pada zona ini sangat menonjol, hal ini terlihat dari banyaknya

jumlah prasarana pendukung berupa resort yang terletak di tepi pantai. Kondisi ini juga ditunjang oleh keberadaan *spot diving* yang banyak tersebar di Selat Lembeh. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam pengembangan Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan antara lain melalui pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, akan dijadikan sebagai pelabuhan perikanan internasional menyamai pelabuhan perikanan di Filipina. Dimana pengembangan pelabuhan (PPS) mengalami peningkatan di tahun 2017. Saat ini, pelabuhan yang berada di atas lahan seluas 8,5 hektare tersebut mampu menampung dan mengolah hasil perikanan tangkap yang siap ekspor ke sejumlah negara. Seluruh kegiatan dalam rangka perwujudan struktur ruang Kota Bitung yang ada di Kecamatan Aertembaga sebagai zona pengembangan akan sangat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap zona inti, sirkulasi serta sistem ketersediaan prasarana dan sarana pendukung Zona pengembangan lainnya adalah dua kecamatan yang ada di Pulau Lembeh yaitu Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan. Kondisi pemanfaatan lahan saat ini di zona pengembangan Pulau Lembeh didominasi oleh kegiatan permukiman, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Kegiatan permukiman pada umumnya berada di pesisir pantai sehingga memungkinkan masyarakat yang ada melakukan kegiatan penangkapan ikan dan juga berkebun.

Kegiatan perikanan di zona pengembangan ini selain perikanan tangkap juga terdapat beberapa masyarakat yang melakukan kegiatan budidaya laut seperti KJA (Keramba Jaring Apung) yang banyak terdapat di bagian pesisir barat Pulau Lembeh. Kegiatan industri perkapalan seperti galangan kapal atau *dock yard* terdapat di Kecamatan Lembeh Selatan dengan konsumen yang berasal dari Kota Bitung dan sekitarnya. Kegiatan pariwisata pada zona ini adalah seperti halnya pada zona pengembangan di Kecamatan Aertembaga yaitu berupa bangunan resort yang banyak terdapat di tepi pantai dengan memanfaatkan *spot diving* yang banyak tersebar di Selat Lembeh. Penempatan Zona pengembangan kawasan Minapolitan Sudah sangat tepat dilihat dari aspek geografis yang

ada akan sangat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap zona inti, sirkulasi serta sistem ketersediaan prasarana dan sarana pendukung.

Input Evaluation

Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan atau bagaimana cara melakukannya?. Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kota Bitung dilihat dari aspek *input* (masukan) dilihat dari indikator utama minapolitan yaitu peningkatan kualitas manajemen pelayanan pelabuhan perikanan yang meliputi beberapa aspek :

A. Aspek Infrastruktur

Pemerintah Kota Bitung mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudera, dimana kelengkapan fasilitasnya lebih ditingkatkan sehingga dapat menjadi pelabuhan perikanan bertaraf internasional, sehingga mampu menyaingi pelabuhan perikanan General Santos yang ada di Pilipina.

Fasilitas Pendukung Kegiatan Perikanan Kota Bitung

- 1) Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Bitung
- 2) Pelabuhan Umum Samudera Bitung
- 3) Pelabuhan Peti Kemas Bitung
- 4) Tempat Pelelangan Ikan / Tempat Pendaratan Ikan Bitung
- 5) SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan)
- 6) Laboratorium Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- 7) Pabrik Es
- 8) Akademi Perikanan Bitung
- 9) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penangkapan Ikan Aertembaga
- 10) Akademi Maritim Indonesia Bitung
- 11) Tangkahan–tangkahan :
 - Dermaga Khusus PT. Anekaloka Indotuna

- Dermaga Khusus Naemundung
- Dermaga Khusus PT. Pathemang Raya
- Dermaga Khusus PT. Bitung Mina Utama
- Dermaga Khusus PT. Binatang Mandiri Bersaudara
- Dermaga Khusus PT. Perikani Bitung PPS Bitung saat ini memiliki areal

reefer container, bengkel kapal perikanan, cold storage, pengolahan ikan, dermaga, docking hingga log perbekalan. Dengan diimplementasikannya Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan ke depan pelabuhan ini bisa menjadi pelabuhan perikanan internasional.

B. Aspek Kelembagaan Dan Regulasi

Yang ingin diwujudkan pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan produksi komoditas perikanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Aspek Input Kelembagaan dan Regulasi meliputi

1. Penetapan Dasar hukum terhadap titik-titik penyelaman (dive sites) yang termasuk dalam Daerah Perlindungan Laut dan Kawasan Konservasi Laut (KKL) di Selat Lembeh Kota Bitung.
2. Pelatihan ketrampilan kerja sektor perikanan
3. Sosialisasi Peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup bagi stakeholder dan masyarakat
4. Master *plan* kawasan Minapolitan

C. Aspek Pendanaan

Pada Aspek Pendanaan, tentunya pemerintah Kota Bitung sangat mengharapkan bantuan dari kementerian terkait untuk dapat mewujudkan konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kota Bitung. Diharapkan ada kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang terkait lewat program-program pembinaan ekonomi, dunia usaha, pengembangan investasi usaha serta fasilitas peluang-peluang dari lembaga keuangan dan perbankan.

Pada Pengembangan Kawasan Minapolitan Tersedianya dana pada Tahun 2011 sejumlah Rp. 177.131.554.000 pada Tahun 2012 Sejumlah Rp.166.016.250.000 Pada Tahun 2013 Sejumlah Rp. 94.000.627.000 dan Pada tahun 2014 Sejumlah Rp. 87.728.625.000

Process Evaluation

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas termasuk menganalisis Apakah yang dilakukan sesuai rencana?" Dalam rangka mengembangkan Bitung sebagai minapolitan percontohan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung terus dikembangkan dan diperlengkapi dengan berbagai fasilitas meliputi perluasan area pelabuhan, pembangunan tempat pendaratan kapal, tempat pelelangan ikan, SPDN dan SPBN, sarana air bersih, pabrik es, kedai pesisir, gedung pertemuan nelayan, pembangunan laboratorium pengujian mutu dan lain sebagainya.

Pada Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Minapolitan tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara dinas terkait dan stakeholder yang ada. Oleh karena itu agar pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan tertata dengan baik dengan pemamfaatan ruang kawasan yang optimal pemerintah Kota Bitung menetapkan kawasan pengembangan minapolitan melalui keputusan Walikota Bitung, nomor 130/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Dalam Daerah Kota Bitung. Dan membentuk Tim Pokja Minapolitan sesuai dengan SK Walikota Bitung Nomor 149/2010.

Pada Evaluasi Proses ini ada dilihat dari pelaksanaan permasalahan infrastruktur :

- 1) Terjadi kemahalan harga air bersih yang disalurkan ke kapal perikanan yaitu sebesar Rp. 28.000/M³. Hal ini mendorong Kementerian PU membangun resorvoir air bersih dengan kapasitas 50 M³ dalam rangka implementasi konsep minapolitan di zona inti.
- 2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia hanya 100 M³ baru dapat menampung limbah buangan TPI dan belum terkoneksi dengan limbah industri.

Dalam rangka pengendalian limbah di pelabuhan perikanan dilakukan dengan upaya usulan pengembangan pembangunan IPAL Terpadu.

- 3) Lahan industri perikanan di PPS Bitung sangat terbatas hanya 5,7 Ha, sedangkan permintaan lahan untuk usaha industri pengolahan ikan sangat tinggi. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan lahan tersebut, maka dilakukan perluasan lahan dengan membeli sebagian lahan PT. Perikanan Nusantara seluas 8 (delapan) ha
- 4) Percepatan sertifikasi lahan tersebut dan pemberian ijin sewa lahan dalam rangka pemanfaatan tanah reklamasi untuk industri pengolahan oleh investor.

Tabel 3. Infrastruktur yang di bangun pada kurun waktu 2010-2013 di kawasan zona inti Minapolitan

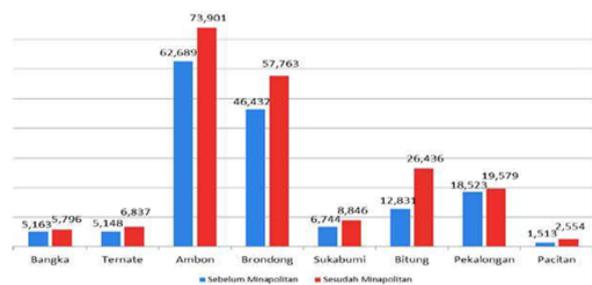
NO	KEGIATAN	JUMLAH BIAYA Rp (000)	SUMBER DANA
1	Pembangunan Trestel Dermaga Tahap I dan II	12.289.288.000	APBN KKP
2	Pembangunan Revetment	909,612,000	APBN KKP
3	Pembangunan Gedung Kantor	849,554,000	APBN KKP
4	Pembangunan Jalan dan Drainase	370,333,000	APBN KKP
5	Pembangunan Pemyediaan Air Bersih	199,000	APBN KKP

Dalam pengembangan Bitung sebagai Kota Minapolitan telah dilaksanakan berbagai pengembangan dan semuanya sesuai dengan rencana awal dimana Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung menjadi motor penggerak pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Bitung. Dimana pelabuhan ini terus dikembangkan menyamai pelabuhan perikanan di Filipina dan terus ditingkatkan hingga tahun 2017. Pelabuhan ini akan meningkat di lahan seluas 8,5 hektar dan mampu menampung dan mengolah hasil perikanan tangkap yang siap diekspor ke seluruh dunia. Seiring dengan pengembangan minapolitan, usaha pengolahan ikan kini tengah digalakkan di kalangan masyarakat pesisir. Sedikitnya terdapat 61 perusahaan pengolah ikan yang didukung 15 dermaga/tangkahan pendaratan di luar Pelabuhan Bitung. Sementara itu unit pengolahan ikan yang turut berkembang adalah pengalengan ikan tuna. Saat ini terdapat 5 pengolahan pengalengan ikan di Kota Bitung

yang diserap oleh pasar internasional. Saat ini terus dikembangkan dan ditingkatkan pelabuhan Bitung seperti areal reefer container, bengkel kapal perikanan, cold storage, pengolahan ikan, dermaga, docking hingga log perbekalan. Untuk itu PPS Bitung akan menyamai pelabuhan General Santos di Filipina dan pengelolaan uang yang ada akan mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan potensinya akan meningkat dua kali lipat pada saat kondisi lahan yang ditingkatkan mencapai 20Ha. Selain itu akan ditingkatkan kualitas pengolahan di PPS dimana peredaran uang akan meningkat mencapai Rp 5 triliun per tahun. Keterbatasan yang ada berupa kapasitas dermaga yang hanya dapat menampung kapal di atas 30 Gt (groston), masih terbatasnya daya listrik pelabuhan yaitu hanya 30KVA, serta kapasitas air bersih untuk nelayan yang hanya 70 ton serta kurangnya konektivitas ke perusahaan perikanan (pabrik) serta masih lemahnya pelaksanaan Port State Measure.

Product/Output Evaluation

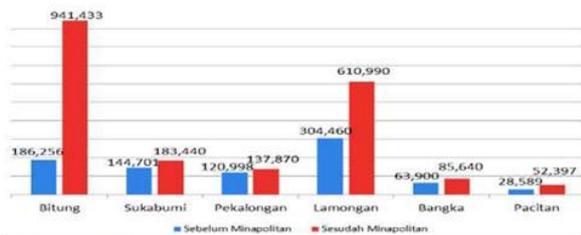
“Apakah pelaksanaannya berhasil tercapai?” Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dalam hubungannya dengan konteks. Evaluasi produk atau hasil adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atau dengan kata lain untuk menjawab pertanyaan “Apakah pelaksanaannya berhasil tercapai?” Evaluasi Produk Berdasarkan data perbandingan kawasan Minapolitan dari beberapa daerah Minapolitan di Indonesia berikut perbandingan Outcome Minapolitan pada beberapa Kota Minapolitan di Indonesia sebelum dan sesudah diimplementasikannya Kota Minapolitan.



Gambar 8. Outcome Minapolitan: Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton) di 8 Kawasan Minapolitan tahun 2013

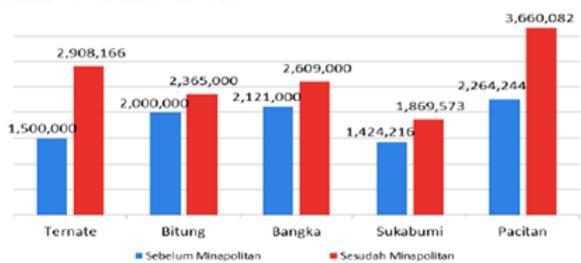
Berdasarkan Gambar 8 outcome volume produksi perikanan tangkap (ton) di 8 Kawasan

Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan volume produksi perikanan tangkap adalah sebesar 12.831 ton sedangkan setelah implementasi kawasan minapolitan di Kota Bitung terjadi peningkatan sebesar 26.436 ton, dimana terjadi peningkatan sebesar 48,53% setelah diimplementasikan kawasan Minapolitan di Kota Bitung khusus untuk volume produksi perikanan tangkap.



Gambar 9. Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp Juta) di 6 Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Gambar 9 nilai produksi perikanan tangkap di 6 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan nilai produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp 186.256 juta dan setelah implementasi terjadi peningkatan menjadi Rp 941.433 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 5 kali lipat terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Kota Bitung, bahkan kota Bitung mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan 5 kawasan Minapolitan lainnya di Indonesia.



Gambar 10 Pendapatan Nelayan (Rp) di 5 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota

daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan pendapatan nelayan rata-rata adalah sebesar Rp 1,5 juta sedangkan setelah implementasi kawasan Minapolitan di Kota Bitung pendapatan nelayan rata-rata menjadi Rp 2,908 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.408.166, atau terjadi kenaikan sebesar hampir 100%.

Outcome volume produksi perikanan tangkap di 8 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan volume produksi perikanan tangkap adalah sebesar 12.831 ton sedangkan setelah implementasi kawasan minapolitan di Kota Bitung terjadi peningkatan sebesar 26.436 ton, dimana terjadi peningkatan sebesar 48,53% setelah diimplementasikan kawasan Minapolitan di Kota Bitung khusus untuk volume produksi perikanan tangkap.

Nilai produksi perikanan tangkap di 6 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan nilai produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp 186.256 juta dan setelah implementasi terjadi peningkatan menjadi Rp 941.433 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 5 kali lipat terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Kota Bitung, bahkan kota Bitung mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan 5 kawasan Minapolitan lainnya di Indonesia. Pendapatan nelayan di 5 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota

minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan pendapatan nelayan rata-rata adalah sebesar Rp 1,5 juta sedangkan setelah implementasi kawasan Minapolitan di Kota Bitung pendapatan nelayan rata-rata menjadi Rp 2,908 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.408.166, atau terjadi kenaikan sebesar hampir 100%.

Tabel 4. Volume dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kota Bitung 2010 - 2016

Tahun	Volume	Nilai
2001	126,530.7	467,884.180
2002	115,489.5	864,726.682
2003	117,434.0	550,321.848
2004	133,034.6	685,723.608
2005	133,924.8	706,107.470
2006	132,706.9	498,940.681
2007	135,272.1	843,341.828
2008	142,362.4	850,490.445
2009	145,053.2	932,961.830
2010	146,940.4	1,214,967,019.18
2011	147,069.8	1,691,579,260.00
2012	159,319.4	1.692.015,445
2013	133,277.6	2.820,272,085
2014	124,501.4	2,420,827.540
2015	59,441.3	925,924,990
2016	49,834.4	1,221,999,118.5

Sumber : Bitung dalam Angka 2017

Pada Tabel 4 diatas dapat dilihat adanya penurunan produksi di tahun 2014 hal ini disebabkan karena menurunnya produksi unit pengolahan ikan di Kota Bitung hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan Bahan baku, yang merupakan dampak dari moratorium kapal asing, dimana 54.223 ton atau 36 persen bahan baku UPI bergantung pada perusahaan penangkapan ikan eks asing. Hal ini juga menyebabkan Unit Pengolahan Ikan melakukan pengurangan jumlah hari operasi dan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja borongan, bukan tenaga kerja tetap.

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Perikanan yang melalui BKIPM Manado di Kota Bitung 2014 - 2016

Tahun	Volume	Nilai
-------	--------	-------

2014	1.341.557,82	40.125.619.655
2015	1.164.011,10	38.117.375,493,00
2016	24.912.446,53	1.191.696.176.279,00

Sumber BKIPM Dalam Angka 2017

Dilihat dari Tabel 5 Untuk Volume dan Nilai Ekspor Perikanan yang melalui BKIPM Manado meningkat signifikan dari kurun waktu 2014-2016

Tabel 6. Perkembangan Nilai Investasi di Kota Bitung Tahun 2003 - 2014

Tahun	Industri		Jumlah Total
	Industri Kecil	Agro, Logam, Dan Kimia	
2003	43.962	394.740	408.702
2004	45.005	496.663	541.668
2005	48.062	496.663	544.725
2006	117.656	455.860	573.516
2007	135.145	656.838	791.983
2008	136.750	659.118	795.868
2009	141.005	659.988	800.123
2010	143.253	679.708	822.961
2011	5.594.411	8.289.988	13.884.399
2012	18.650.950	75.102.000	93.752.950
2013	18.653.909	1.308.887.689	1.327.541.598
2014	18.655.000	1.631.621.628	1.650.276.628

Sumber : Bitung Dalam Angka 2017

Tetapi walau produksi menurun Nilai Investasi meningkat di Kota bitung kurun waktu 2003-2014 dilihat dari tabel 11 dan juga Nilai Tukar Nelayan (NTN) di provinsi Sulawesi Utara. Menurut data Badan Pusat Statistik (2015), NTN di Bitung meningkat dari 109,40 pada 2014 menjadi 111,42 pada 2015. Untuk itu, pemerintah mengapresiasi peningkatan produktivitas perikanan di Bitung dan berkomitmen perikanan tangkap seratus persen diperuntukkan bagi usaha dalam negeri.

Pembahasan

Kota Bitung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi daerah yang difokuskan oleh pemerintah untuk dikembangkan sebagai wilayah atau kota Minapolitan. Kota minapolitan merupakan pembangunan kota dimana ekonomi berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan dengan sektor utama pada kelautan dan perikanan. Selain itu kota atau kawasan minapolitan merupakan bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran

komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kota Bitung dipilih menjadi salah satu kota kawasan Minapolitan lewat penetapa pemerintah. Bitung dijadikan sebagai kawasan atau kota Minapolitan didasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 32/MEN/2010 tgl. 14 Mei 2010, dimana kota Bitung ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Minapolitan dari 197 Kabupaten/Kota di Indonesia serta SK Walikota Bitung No. 130 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Kota Bitung. Kota Bitung dipilih karena:

1. Bitung memiliki letak strategis yang berada di selat Lembeh dan berhadapan dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sehingga berperan sebagai pelabuhan perikanan lingkaran luar Indonesia.
2. Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dimana daerah ini memiliki spesies endemik langka, kawasan pemijahan ikan paus, daerah migrasi ikan pelagis (tuna, cakalang, serta tongkol), potensi ini menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara, selain itu 60% dari 2.000 jenis ikan yang ada di perairan Indonesia berada di perairan kawasan Kota Bitung dan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Lokasi Bitung berada di bibir Asia dan Pasifik memungkinkan pengembangan Bitung menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia.
4. Potensi pengembangan yang besar dan belum dimanfaatkan sepenuhnya pada sektor bahari dan kelautan serta produksi dan pengolahan serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan yang terus menerus dari volume dan nilai ekspor perikanan di Kota Bitung.
6. Sumber daya manusia trampil dan berpengalaman di bidang kelautan serta infrastruktur penunjang yang cukup sehingga layak dijadikan sebagai pusat pengembangan industri kelautan di Indonesia.

Evaluasi pelaksanaan kawasan Minapolitan di Bitung menggunakan Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product Evaluation*) dalam rangka mengetahui keberhasilan atau sejauh mana suatu tujuan atau program berhasil atau pencapaian yang telah dicapai antara lain:

Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Kota Minapolitan yang telah dijalankan di Kota Bitung sejak tahun 2010, dimana kota Bitung mensinkronkan visi, misi serta tujuan kota Bitung dengan program kota Minapolitan. Pertimbangannya karena Bitung memiliki letak strategis karena berada di Selat Lembeh yang berhadapan dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik sehingga berperan sebagai pelabuhan perikanan lingkaran luar Indonesia. Keberadaannya di bibir Asia dan Pasifik memungkinkan pengembangan Bitung menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia. Dengan potensi besar ini, maka di Bitung seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian dari sektor kelautan.

Masalahnya adalah pengembangan sektor kelautan masih belum menjadi prioritas dan mendapat perhatian sepenuhnya (100%). Hal ini berdampak pada sektor kelautan belum mampu meningkatkan perekonomian kota, wilayah, secara signifikan. Hal ini kemudian maka industri perikanan diarahkan pada industri pengolahan perikanan laut, khususnya peningkatan nilai tambah potensi beberapa jenis ikan ekonomis tinggi seperti cakalang, tuna, dan layang. Luaran atau output yang diharapkan dari pengembangan Kota Minapolitan di Kota Bitung berupa hasil kegiatan Minapolitan berupa:

- 1) Pembinaan dan pengelolaan usaha di bidang Minapolitan;
- 2) Kelembagaan usaha di bidang Minapolitan;
- 3) Investasi dan permodalan di bidang Minapolitan;
- 4) Ketenagakerjaan di bidang Minapolitan;
- 5) Serta pengembangan dan peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung Minapolitan

Dari luaran atau output akan membawa outcome atau hasil berupa:

1. Terjadi peningkatan produksi non migas yaitu ikan, ekspor ikan dan produk-produk perikanan;
2. Produktivitas kota dan masyarakat meningkat atau naik;
3. Harga ikan mengalami peningkatan;
4. Kesempatan kerja naik dan pengangguran menurun;
5. Terjadi diversifikasi usaha baik usaha mikro, kecil dan menengah di seputaran usaha-usaha berbasis minapolitan

Luaran atau output tadi memiliki manfaat atau benefit kepada masyarakat, lingkungan dan warga Kota Bitung berupa,

- 1) Perbaikan kesehatan masyarakat;
- 2) Peningkatan pendidikan masyarakat;
- 3) Peningkatan pendapatan masyarakat;
- 4) Perbaikan infrastruktur penunjang seperti air bersih dan listrik;
- 5) Peningkatan perumahan dan lingkungan perumahan yang baik;
- 6) Keamanan menjadi baik dan tingkat kriminalitas menurun

Kesemuanya dari Kota Minapolitan Bitung ini berdampak secara tidak langsung pada naiknya atau meningkatnya kesejahteraan rakyat (kesra) di segala bidang, dan produksi yang meningkat berdampak pada PDRB atau produk domestik bruto mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk itu pengembangan Kota Minapolitan di Kota Bitung antara lain yaitu,

- 1) Identifikasi potensi masalah, serta produk-produk unggulan;
- 2) Penetapan lokasi utama minapolitan;
- 3) Penetapan kawasan minapolitan;
- 4) Pengembangan Masterplan Minapolitan;
- 5) Membuat Proposal Bisnis (Business Plan) tentang Kota Minapolitan Kota Bitung;
- 6) Membuat Rencana Tindakan (Action Plan) terkait dengan pelaksanaan Bitung menjadi Kota Minapolitan.

Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

Untuk itu dalam rangka mencapai visi, misi serta tujuan Kota Bitung sebagai kota Minapolitan maka perlu diketahui faktor yang bisa mendorong, mengakselerasi, serta melanggengkan pencapaian tujuan tersebut. Hal tersebut bisa dicapai antara lain dari,

- 1) Komitmen daerah;
- 2) Ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- 3) Adanya aktivitas usaha penangkapan ikan;
- 4) Adanya aktivitas pengolahan dan pemasaran hasil-hasil laut dan perikanan;
- 5) Adanya aktivitas usaha pendukung terkait dengan aktivitas utama tadi;
- 6) Lingkungan yang layak;
- 7) Sesuai dengan Renstra, RTRW, dan lain-lain dari perencanaan awal kota Bitung;
- 8) Adanya fasilitas pendukung untuk menunjang kawasan Minapolitan tadi;
- 9) Memiliki letak strategis;

- 10) Memiliki data dan informasi yang terkait dan relevan tentang penciptaan Kota Minapolitan Kota Bitung.

Selain itu, karakteristik utama yang diperlukan bagi Kota Minapolitan yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Ketiga hal ini telah dimiliki oleh Kota Bitung dimana sumber daya alam berupa ikan yang sangat melimpah, sumber daya manusia dimana banyak terdapat tenaga terampil dan berpengalaman serta terdidik di bidang kelautan serta didukung oleh masyarakat dengan latar belakang budaya yang biasa melaut khususnya masyarakat yang berasal dari wilayah kepulauan yaitu Nusa Utara baik Sangihe, Talau, serta Sitaro, selanjutnya juga sarana dan prasarana yang mendukung seperti pelabuhan laut alam, adanya pelabuhan laut besar yang terus diperluas dan dikembangkan, dukungan pemerintah serta perahu-perahu dan pabrik-pabrik perikanan yang turut mendukung Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Dalam pengembangan Bitung sebagai Kota Minapolitan telah dilaksanakan berbagai pengembangan dan semuanya sesuai dengan rencana awal dimana Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung menjadi motor penggerak pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Bitung. Dimana pelabuhan ini terus dikembangkan menyamai pelabuhan perikanan di Filipina dan terus ditingkatkan hingga tahun 2017. Pelabuhan ini akan meningkat di lahan seluas 8,5 hektar dan mampu menampung dan mengolah hasil perikanan tangkap yang siap diekspor ke seluruh dunia. Saat ini terus dikembangkan dan ditingkatkan pelabuhan Bitung seperti areal reefer container, bengkel kapal perikanan, cold storage, pengolahan ikan, dermaga, docking hingga log perbekalan. Untuk itu PPS Bitung akan menyamai pelabuhan General Santos di Filipina dan pengelolaan uang yang ada akan mencapai Rp 2,5 triliun. Bahkan potensinya akan meningkat dua kali lipat pada saat kondisi lahan yang ditingkatkan mencapai 20Ha. Selain itu akan ditingkatkan kualitas pengolahan di PPS dimana peredaran uang akan meningkat mencapai Rp 5

triliun per tahun. Keterbatasan yang ada berupa kapasitas dermaga yang hanya dapat menampung kapal di atas 30 Gt (grosston), masih terbatasnya daya listrik pelabuhan yaitu hanya 30KVA, serta kapasitas air bersih untuk nelayan yang hanya 70 ton serta kurangnya konektivitas ke perusahaan perikanan (pabrik) serta masih lemahnya pelaksanaan Port State Measure.

Evaluasi Produk/Luaran (Product/Output Evaluation)

Outcome volume produksi perikanan tangkap di 8 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan volume produksi perikanan tangkap adalah sebesar 12.831 ton sedangkan setelah implementasi kawasan minapolitan di Kota Bitung terjadi peningkatan sebesar 26.436 ton, dimana terjadi peningkatan sebesar 48,53% setelah diimplementasikan kawasan Minapolitan di Kota Bitung khusus untuk volume produksi perikanan tangkap. Nilai produksi perikanan tangkap di 6 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan nilai produksi perikanan tangkap adalah sebesar Rp 186.256 juta dan setelah implementasi terjadi peningkatan menjadi Rp 941.433 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 5 kali lipat terhadap nilai produksi perikanan tangkap di Kota Bitung, bahkan kota Bitung mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan 5 kawasan Minapolitan lainnya di Indonesia. Pendapatan nelayan di 5 Kawasan Minapolitan yang telah ditetapkan pemerintah dimana semua daerah yang telah diimplementasikan kota minapolitan terlihat terjadi peningkatan sebelum diimplementasikan dan sesudah diimplementasikan kawasan minapolitan di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Kota Bitung sebelum implementasi kawasan Minapolitan pendapatan nelayan rata-rata adalah sebesar Rp 1,5 juta sedangkan setelah implementasi kawasan Minapolitan di Kota Bitung pendapatan nelayan rata-rata menjadi Rp

2,908 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 1.408.166, atau terjadi kenaikan sebesar hampir 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya yaitu:

1. Berdasarkan Evaluasi Konteks pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan di Kota Bitung sudah sangat sesuai jika Kota Bitung ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 karena Kota Bitung memenuhi syarat-syarat sebuah kawasan ditetapkan sebagai kawasan minapolitan yang salah satunya adalah letak yang strategis dan sumber daya alam yang tersedia.
2. Berdasarkan evaluasi input dilihat dari beberapa aspek antara lain :
 - a. Aspek Infrastruktur, masih kurangnya fasilitas pendukung yang ada dalam menunjang pengembangan kawasan minapolitan di Kota Bitung, sehingga di butuhkan perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan infrastruktur yang memadai agar program tersebut mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Aspek Kelembagaan dan Regulasi, masih kurangnya lahan industri sehingga menghambat investasi dalam peningkatan kawasan minapolitan, sehingga dibutuhkan komitmen daerah dan pusat untuk menetapkan lahan industri bagi pelaku usaha dan memudahkan regulasi.
 - c. Aspek Pendanaan, tersedianya dana dalam pengembangan kawasan minapolitan untuk mengembangkan kawasan minapolitan.
3. Berdasarkan evaluasi proses, sudah sesuai dengan rencana awal. Di mana Pelabuhan Samudara Birung menjadi motor penggerak dan pelabuhan tersebut terus dikembangkan untuk menyamai pelabuhan perikanan di Filipina.
4. Berdasarkan Evaluasi produk, pelaksanaan program minapolitan di Kota Bitung

meingkatkan volume dan nilai produksi perikanan tangkap di Kota Bitung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis yaitu:

1. Kawasan Minapolitan di Kota Bitung perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga mencapai kota Bitung sebagai kota Minapolitan internasional yang sarana dan prasarana, infrastruktur, sumber daya manusia, serta menjaga sumber daya alam dari penangkapan yang berlebihan. Hal ini perlu ada peran serta dari seluruh komponen di Kota Bitung serta daerah-daerah sekitar.
2. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menjadi setara dengan pelabuhan perikanan di Filipina bahkan melebihi Filipina bahkan menjadikan pelabuhan Bitung sebagai hub utama dari seluruh pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia.
3. Perlu adanya komitmen dari pemerintah pusat, kawasan, provinsi serta daerah dalam rangka menjadikan Kota Bitung sebagai Kota Minapolitan nomor satu di Indonesia. Hal ini jika terealisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kawasan serta provinsi dan terutama di Kota Bitung.
4. Perlu adanya perhatian jangka panjang terhadap lingkungan hidup penyangga kota Bitung, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disekolahkan ataupun dilatih di bidang perikanan dan kelautan di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan terkemuka di luar negeri, serta menarik investasi besar-besaran pada industri pengolahan perikanan di Kota Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2010 Keputusan Menteri Kelautan Nomor KEP32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
- Anonimous. 2010 Peraturan Menteri Kelautan Nomor : PER18/MEN/2012 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan.

- Anonimous, 2012 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013
- Anonimous, 2012 Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 130 Tahun 2010
- Anonimous, 2017 BKIPM Dalam Angka
- Anonimous. 2013 Sekretariat Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengembangan Kawasan Minapolitan.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI ed.). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Bitung, 2017 Kota Bitung Dalam Angka 2017
- Bitung 2015, RPJP Kota Bitung 2005-2025
- CV Sulfana Jaya, 2011 Masterplan Kawasan Minapolitan Kota Bitung
- Hasibuan, H. Malayu SP. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta Penerbit: Bumi Aksara.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. Capaian 2010-2014 dan Strategi Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap 2015-2019. Rekornas Minapolitan 2014, Batam, 21-23 September.
- Kementerian Pekerjaan Umum, 2012 Agropolitan dan Minapolitan Konsep Kawasan menuju keharmonisan
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Erlangga, Jakarta.

- Mustafa, Z. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Bandung, Penerbit Graha Ilmu
- Mangkunegara. A. P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Ketiga. Bandung: Rosdakarya
- Mathis dan Jackson. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mustofa, Beny Ivan. 2011. *Evaluasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan “Kampung Lele” frngsn Model CIPP (Context, Input, Process, Product) Didesa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali*
- Pramoda, R., Zulham, A., dan Sari, Y. D. 2013. *Kebijakan Penetapan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai Kawasan Inti Minapolitan. Jurnal Borneo Administrator*. 9(1): 33-52.
- Radityo Pramoda, Armen Zulham, Yesi Deswita Sari. 2013. *Kebijakan pPenetapan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai Kawasan Inti Minapolitan*
- Riduwan. 2010. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Robbins, S. P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Riduwan. 2010. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sakul, dan Gosal. 2015. *Pabrik Pengolahan Ikan Tuna di Bitung. Jurnal Unsrat*. 128-137.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, cv. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Siagian, S. P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tumengkol, W. L. Palar, S. W. Dan Rotinsulu, D. Ch. 2014. *Kinerja dan Daya Saing Ekspor Hasil Perikanan Laut Kota Bitung. Jurnal MIE*. FEB Unsrat.
- Yamin, S., dan Kurniawan, H. 2009. *SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Jakarta: Penernit Salemba Infotek.
- Yusuf Faida T, 2000 *Evaluasi Program Jakarta*. PT. Rineka Cipta
- Yulighin Khoirul Aswana, Anthon Efai, Agus Tjahjono, 2013, *Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brodong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. JurnalECSOFim 1 (1):97*